



# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 3 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta 10270  
Telepon 5704501 – 04 Telex 65591

4 September 2024

Nomor : UN.269/SETJEN/ROUM/KLN.3/9/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Undangan

Kepada Yth.  
**Daftar Undangan**  
**(Terlampir)**  
di  
Tempat

Dalam rangka implementasi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu / 11 September 2024  
Pukul : 08.30 WIT s.d selesai  
Tempat : Aston Sorong Hotel & Conference Center  
Jl. Basuki Rahmat, Malaingkeci, Kec. Sorong Utara, Kota  
Sorong, Papua Barat Daya. 98412  
Agenda : Sosialisasi Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030  
Provinsi Papua Barat Daya

Mengingat pentingnya acara dimaksud, diharapkan Bapak/Ibu/Saudara/i dapat hadir tepat waktu. Adapun materi sosialisasi *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 dapat diunduh pada link: [https://bit.ly/Materi\\_PapuaBaratDaya](https://bit.ly/Materi_PapuaBaratDaya). Dapat kami informasikan bahwa panitia hanya menyediakan konsumsi selama acara berlangsung, untuk transportasi dan akomodasi mohon dapat dialokasikan dari anggaran masing-masing instansi.

Demikian, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.



**Sekretaris Jenderal,  
Selaku Ketua Pelaksana**

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**  
**NIP. 19640930 198903 1 001**

Tembusan Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Sekretaris Tim Kerja FOLU *Net Sink* 2030
4. Ketua Harian 1 Tim Kerja FOLU *Net Sink* 2030
5. Ketua Harian 2 Tim Kerja FOLU *Net Sink* 2030

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, agar setiap peserta membawa Surat Tugas dari instansi masing-masing.
2. Biaya perjalanan dinas dan akomodasi dibebankan pada anggaran instansi masing-masing, Panitia hanya menyediakan konsumsi selama acara berlangsung.

Lampiran 1 Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor : UN.269/SETJEN/ROUM/KLN.3/9/2024  
Tanggal : 4 September 2024

## **DAFTAR UNDANGAN**

### **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selaku Sekretaris Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*
2. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Energi
3. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc, Ketua Harian 1 Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*
4. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc, Ketua Harian 2 Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
6. Dr. Ristiano Pribadi, S.Hut., M.Tourism, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
7. Erik Teguh Primiantoro, S.Hut, MES, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan selaku Sekretaris 1 Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*
8. Dr. Ir. Syaiful Anwar, M.Sc., Sekretaris 2 Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
10. Kepala Biro Perencanaan
11. Ir. Istanto, M.Sc, Ketua Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari
12. Ir. Helmi Basalamah, Ketua Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon
13. Dr. Ir. Wiratno, M.Sc, Ketua Bidang III Konservasi
14. M.R. Karlansyah, Ketua Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut
15. Ir. Emma Rahmawati, M.Sc, Ketua Bidang V Instrumen dan Informasi
16. Agus Yasin, S.Hut., M.Si., Kepala Kelompok Kerja Teknik Restorasi, BRGM
17. Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
18. Kepala Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial LHK
19. Kepala Sub Direktorat Rencana Kehutanan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
20. *Project Manager* RBC Tahap I Kerjasama Indonesia Norwegia
21. Tim Sekretariat *Operation Management Office IFNS 2030*

### **Instansi/Lembaga Terkait**

22. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

### **Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya**

23. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya
24. Staf Ahli Bidang Ekonomi
25. Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra Sekda Papua Barat Daya
26. Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya

27. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Papua Barat Daya
28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan & Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
29. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan & Perikanan Provinsi Papua Barat Daya
30. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat Daya
31. Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya
32. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Papua
33. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
34. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga & Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya
35. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi Papua Barat Daya
36. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Provinsi Papua Barat Daya
37. Kepala Dinas Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat & Kampung Provinsi Papua Barat Daya
38. Kepala Dinas Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat Provinsi Papua Barat Daya
39. Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat Daya
40. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya
41. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah, Perindustrian & Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya
42. Kepala Dinas Komunikasi & Informatika, Statistik & Persandian Provinsi Papua Barat Daya
43. Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya
44. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Barat Daya
45. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya
46. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya
47. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
48. Kepala Bidang Perencanaan, Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
49. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan PS Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
50. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
51. Kepala Seksi Perencanaan dan Tata Hutan Pada Bidang Perencanaan, Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
52. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Pada Bidang Perencanaan, Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
53. Kepala Seksi Pengawasan Kehutanan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya

54. Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Lahan Pada Bidang Pengelolaan DAS dan PS Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
55. Kepala Seksi Perhutanan Sosial pada Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
56. Kepala Seksi Penyuluhan pada Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
57. Kepala Seksi Penataan Lingkungan Hidup pada Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
58. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas Pada Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
59. Kepala Seksi Pengendalian Perencanaan dan Kerusakan Lingkungan serta Perubahan Iklim pada Bidang Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
60. Kepala Seksi Penatausahaan Tanah pada Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
61. Kepala Seksi Fasilitas Pengadaan Tanah Pada Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
62. Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah Pada Bidang Pertanahan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya

#### **Akademisi/Tenaga Ahli**

63. Rektor Universitas Muhamadiyah Sorong
64. Rektor Universitas Victory Sorong
65. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah
66. Prof. Golar, Universitas Tadulako
67. Dr. Ir. Obed N. Lense, M.Sc., Universitas Papua
68. Dr. Ir. Julius D. Nugroho, M.Sc., Universitas Papua

#### **Instansi Pusat di Papua Barat Daya**

69. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat Daya
70. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat Daya

#### **Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat**

71. Bupati Maybrat
72. Sekretaris Daerah Kabupaten Maybrat
73. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maybrat
74. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Pemukiman dan Perumahan Rakyat Kabupaten Maybrat
75. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maybrat
76. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat
77. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Maybrat
78. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maybrat

79. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maybrat
80. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Maybrat

**Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat**

81. Bupati Raja Ampat
82. Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat
83. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat
84. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat
85. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Raja Ampat
86. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Raja Ampat
87. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Raja Ampat
88. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Raja Ampat
89. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Raja Ampat
90. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Raja Ampat
91. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat
92. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Raja Ampat
93. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Raja Ampat
94. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Raja Ampat

**Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Tambrau**

95. Bupati Tambrau
96. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau
97. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Tambrau
98. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tambrau
99. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tambrau
100. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tambrau
101. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tambrau
102. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tambrau
103. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tambrau
104. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tambrau

**Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan**

105. Bupati Sorong Selatan
106. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan
107. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sorong Selatan
108. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Selatan
109. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan
110. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sorong Selatan

111. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong Selatan
112. Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong Selatan
113. Kepala Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong Selatan
114. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong Selatan
115. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong Selatan
116. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong Selatan
117. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Sorong Selatan
118. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sorong Selatan
119. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sorong Selatan
120. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sorong Selatan

**Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Sorong**

121. Bupati Sorong
122. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong
123. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sorong
124. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong
125. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
126. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sorong
127. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sorong
128. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sorong
129. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sorong
130. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong
131. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong
132. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
133. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sorong
134. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sorong
135. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong

**Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Sorong**

136. Walikota Sorong
137. Sekretaris Daerah Kota Sorong
138. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Sorong
139. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Sorong
140. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sorong
141. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sorong
142. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Sorong
143. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong
144. Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong
145. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sorong

**UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat Daya**

146. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
147. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat
148. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Manokwari.
149. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVI Manokwari
150. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Remu Ransiki Manokwari
151. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla Wilayah Maluku Papua
152. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua
153. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku Papua
154. Kepala Seksi Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Manokwari
155. Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI Manokwari
156. Kepala Seksi Wilayah III BPPI Wilayah Maluku Papua Di Sorong
157. Kepala Seksi Wilayah II Sorong BPSKL Maluku Papua

**UPTD Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya**

158. Kepala Kesatuan Pegelolaan Hutan Produksi Unit I Kabupaten Raja Ampat
159. Kepala Kesatuan Pegelolaan Hutan Produksi Unit II Kota Sorong
160. Kepala Kesatuan Pegelolaan Hutan Produksi Unit III Kabupaten Sorong
161. Kepala Kesatuan Pegelolaan Hutan Lindung Unit IV Kabupaten Tambrauw
162. Kepala Kesatuan Pegelolaan Hutan Produksi Unit V Kabupaten Maybrat
163. Kepala Kesatuan Pegelolaan Hutan Produksi Unit VI Kabupaten Sorong Selatan
164. Kepala SMK Kehutanan Negeri Manokwari

**Mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Tokoh Masyarakat**

165. GIZ FORCLIME
166. Yayasan Econusa
167. Yayasan Konservasi Indonesia
168. Yayasan Konservasi Alam Nusantara
169. Yayasan Bentara
170. Yayasan Samdhana Institute
171. Yayasan Kehati
172. Flora dan Fauna Indonesia
173. Yayasan Mahkota Tanah Papua
174. WWF Indonesia
175. Word Resources Institut Indonesia
176. PBPH PT. Bangun Kayu Irian
177. PBPH PT. Mitra Pembangunan Global
178. PBPH PT. Manca Raya Agro Mandiri
179. PBPH PT. Multi Wahana Wijaya
180. PBPHH CV. Alco Timber Irian

181. PBPHH CV. Prima Papua
182. PBPHH PT. Austindo Nusantara Jaya Agri Papua
183. PBPHH CV. Klalin Indah Funiture
184. PBPHH CV. Sebyar jaya
185. PBPHH CV. Green Diamond Papua
186. PBPHH CV. Jaya Makmur Sejahtera
187. PBPHH CV. Sorong Timber Irian
188. PBPHH CV. Karya bersama Papua
189. PBPHH CV. Anugerah Rimba Papua
190. PBPHH CV. Linux Abadi
191. PBPHH PT. Bagus Jaya Abadi
192. PBPHH PT. Uniraya Timber
193. PBPHH PT. Siliwangi Karya Sejahtera
194. PBPHH PT. Bangkit Cipta Mandiri
195. PBPHH PT. Hartawan Indo Timber
196. PT. GAG Nekei
197. PT Inti Kebun Sejahtera
198. PT. Putra Mandiri Perkasa
199. PT. Inti Kebun Sawit
200. PT. Kawei Sejahtera Mining



Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
 Nomor : UN.269/SETJEN/ROUM/KLN.3/9/2024  
 Tanggal : 4 September 2024

**JADWAL TENTATIF**  
**SOSIALISASI SUB NASIONAL *INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030***  
**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**  
**SORONG, 11 SEPTEMBER 2024**

Waktu	Kegiatan	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVII Manokwari
08.30 – 08.45	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Rimbawan</li> <li>Pembacaan Doa</li> </ul>	Sekretariat FOLU
08.45 – 09.00	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sub Nasional <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> Provinsi Papua Barat Daya	Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
09.00 – 09.20	Sambutan Staf Ahli Menteri LHK	Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi
09.20 – 09.45	Sambutan dan Pembukaan oleh Gubernur Papua Barat Daya	Pj. Gubernur Papua Barat Daya
09.45 – 10.00	<i>Coffee Break</i>	
10.00 – 10.15	Arahan Umum <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	Ketua Harian I Tim Kerja FOLU <i>Net Sink 2030</i>
10.15 – 12.30	Paparan Rencana Kerja Bidang FOLU Net Sink 2030 <ol style="list-style-type: none"> <li>Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari</li> <li>Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon</li> <li>Bidang III Konservasi</li> <li>Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut</li> <li>Bidang V Instrumen dan Informasi</li> </ol>	Moderator : Sekretaris 2 Tim Kerja Kerja <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>
12.30 – 13.30	ISHOMA	
13.30 – 15.30	Diskusi/Tanggapan Peserta <i>Online/Offline</i>	Moderator : Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
15.30 – 15.45	<i>Coffee Break</i>	
15.45 – 16.15	Pembacaan <i>Wrap Up</i>	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya
16.15 – 16.30	Penutupan	Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SOSIALISASI SUB NASIONAL  
*INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU)  
NET SINK 2030 REGION PAPUA DI 4 (EMPAT) PROVINSI***



**Jakarta,     Juli 2024**

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**SOSIALISASI SUB NASIONAL**  
**INDONESIA'S FORESTRY AND OTHER LAND USE (FOLU)**  
**NET SINK 2030 REGION PAPUA DI 4 (EMPAT) PROVINSI**

**A. Latar Belakang**

Komitmen Indonesia menahan laju peningkatan suhu global dan perubahan iklim dituangkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC), sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Paris sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Persetujuan Paris mengharuskan Indonesia untuk menguraikan dan mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim pasca tahun 2020 dalam dokumen Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional (NDC) dan telah menetapkan peta jalan mitigasi sebagai acuan pelaksanaan NDC. Dokumen Peta Jalan (*Road Map*) merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyediaan informasi tentang perencanaan, tata waktu dan penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per subsektor serta identifikasi seluruh aspek yang mendukung pencapaian target (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019).

Dalam mencapai target jangka panjang, NDC berperan untuk menjembatani komitmen penurunan emisi menuju *Net Sink* melalui penguatan dan peningkatan aksi mitigasi dan dukungan internasional, terutama pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai salah satu sektor pengemisi yang juga merupakan penyerap emisi terbesar diantara sektor lainnya. Dalam komitmen NDC, sektor FOLU mengalami tren penurunan nilai emisi sejak tahun 2010, namun masih sebagai sektor pengemisi GRK (*net emitter*), dengan tingkat emisi pada tahun 2030 sebesar 216 juta ton CO<sub>2e</sub>. Pada tahun 2021, Indonesia telah menyampaikan *Updated* NDC dan telah menyusun Strategi Jangka Panjang Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (Long Term Strategy Low Carbon and Climate Resilience 2050; LTS-LCCR 2050) yang disampaikan kepada Sekretariat *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada Juli 2021 sebelum penyelenggaraan Conference of Parties UNFCCC (COP 26) di Glasgow pada November 2021. Pada skenario *Long Term Strategy Low Carbon Compatible with Paris Agreement* (LTS-LCCP) atau skenario ambisius berdasarkan Persetujuan Paris, sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan ini sudah mencapai kondisi *Net Sink* yaitu tingkat -140 juta ton CO<sub>2e</sub> di tahun 2030.

Selanjutnya *Enhanced* NDC yang diikuti dengan peningkatan target menjadi lebih ambisius yaitu 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Peningkatan ambisi penurunan emisi GRK tersebut dengan penguatan pada 3 (tiga) yang meliputi: (1) *Sustainable Forest Management*; (2) *Environmental Governance*; dan (3) *Carbon Governance*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, penurunan emisi didukung oleh pengendalian emisi gas rumah kaca sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan carbon *Net Sink* dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forest and Other Land Use Net Sink* 2030). Memperhatikan hal tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan akselerasi telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Untuk menetapkan target penurunan Emisi Gas Rumah Kaca secara Nasional telah ditetapkan Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 yang memuat 11 (sebelas) Rencana Operasional dan 1 (satu) rencana operasional operasional pengelolaan mangrove, sebagai berikut : (1) Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Mineral; (2) Pengurangan Laju Deforestasi Lahan Gambut; (3) Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Mineral; (4) Pengurangan Laju Degradasi Hutan Lahan Gambut; (5) Pembangunan Hutan Tanaman; (6) Sustainable Forest Management; (7) Rehabilitasi Dengan Rotasi; (8) Rehabilitasi Non Rotasi; (9) Restorasi Gambut; (10) Perbaikan Tata Air Gambut; (11) Konservasi Keanekaragaman Hayati dan (12) Pengelolaan Mangrove.

Dalam rangka akselerasi implementasi Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menyebarluaskan informasi dengan mensosialisasikan secara luas pada stakeholder hingga ke tingkat tapak terhadap Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030. Pada tahun 2022-2023 telah dilaksanakan Sosialisasi Regional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 pada 6 (enam) regional yaitu Regional Sumatera, Regional Jawa Bagian Barat, Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Regional Sulawesi, Regional Kalimantan, dan Regional Maluku Papua. Selanjutnya dilaksanakan Sosialisasi Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 pada 32 provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Sehubungan dengan pelaksanaan penyebaran informasi dan sosialisasi Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Region Papua di 4 provinsi Pulau Papua, pada tahun 2024 akan dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan yang pelaksanaannya akan dilakukan secara series. Pelaksanaan sosialisasi akan diselenggarakan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing-masing provinsi.

## B. Maksud dan Tujuan

Sosialisasi Sub Nasional Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Region Papua dimaksudkan untuk menyampaikan kebijakan, strategi, dan rencana untuk implementasi rencana aksi mitigasi yang mengacu pada target penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 kepada seluruh masyarakat secara langsung maupun melalui stakeholder.

## C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Sosialisasi Sub Nasional Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Region Papua akan dilaksanakan pada 4 (empat) Provinsi secara *hybrid* pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Oktober 2024, dengan rencana waktu dan tempat pelaksanaan sebagai berikut:

No.	Provinsi	Waktu	Tempat
1.	Papua Selatan	Juli 2024	Auditorium Pemerintahan Provinsi Selatan
2.	Papua Barat Daya	September 2024	Auditorium Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya
3.	Papua Pegunungan	Oktober 2024	Auditorium Pemerintahan Provinsi Pegunungan
4.	Papua Tengah	Oktober 2024	Auditorium Pemerintahan Provinsi Tengah

## D. Peserta

Peserta Sosialisasi Sub Nasional Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 Region Papua pada 4 (empat) provinsi di Pulau Papua dilaksanakan secara *hybrid* yaitu *offline* dan *online* dengan jumlah peserta  $\pm$  200 orang yang terdiri dari unsur sebagai berikut :

### I. Lingkup Provinsi

1. Sekretariat Daerah Provinsi
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
3. Dinas Kehutanan Provinsi;
4. Dinas Perkebunan Provinsi;
5. Dinas Pertanian Provinsi;
6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
8. Dinas Komunikasi dan Informasi
9. ATR/BPN;
10. UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat;
11. Akademisi (FOReTIKA) dan Fakultas Pertanian Universitas setempat;
12. Mitra dan LSM terkait;

13. Tokoh/ Kelompok Masyarakat;
14. Media;
15. Instansi terkait lainnya.

## II. Lingkup Kabupaten

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten;
3. Dinas Kehutanan Kabupaten;
4. Dinas Perkebunan Kabupaten;
5. Dinas Pertanian Kabupaten;
6. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten;
7. UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat;
8. ATR/BPN Kabupaten/Kota;
9. Dinas PUPR Kabupaten/Kota;
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
11. Kelompok Tani Hutan (KTH);
12. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM);
13. Akademisi (FOReTIKA) dan Fakultas Pertanian Universitas setempat;
14. Mitra dan LSM terkait;
15. Tokoh/ Kelompok Masyarakat;
16. Media;
17. Instansi terkait lainnya.

## E. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Sub Nasional Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Region Papua* adalah Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

## F. Agenda Pelaksanaan

Sosialisasi Sub Nasional Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Region Papua* dilaksanakan secara *hybrid*, dengan jadwal *tentative* berikut:

### Jadwal Tentatif Sosialisasi Sub Nasional Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Region Papua*

Waktu	Kegiatan	PIC
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	UPT Penanggung Jawab
08.30 – 08.45	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Rimbawan</li> <li>• Pembacaan Doa</li> </ul>	UPT Penanggung Jawab
08.45 – 09.00	Laporan Penanggung Jawab Pelaksanaan Sosialisasi Sub Nasional <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Region Jawa</i>	Sekretariat FOLU

Waktu	Kegiatan	PIC
09.00 – 09.30	Sambutan dan Pembukaan oleh Gubernur	UPT Penanggung Jawab/Pemprov
09.30 – 10.00	Arahan Umum <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> oleh Ketua Pelaksana/ Ketua Harian I/Ketua Harian II Tim Kerja FOLU <i>Net Sink 2030</i>	Sekretariat FOLU
10.00 – 10.15	<i>Coffee Break</i>	Sekretariat FOLU
10.15 – 12.30	Paparan Rencana Kerja Bidang FOLU Net Sink 2030 1. Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari 2. Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon 3. Bidang III Konservasi 4. Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut 5. Bidang V Instrumen dan Informasi	Moderator :  Sekretaris/ Wakil Sekretaris I/ Wakil Sekretaris II Tim Kerja FOLU <i>Net Sink 2030</i>
12.30 – 13.30	ISHOMA	UPT Penanggung Jawab
13.30 – 15.30	Diskusi/Tanggapan Peserta <i>Online/ Offline</i>	Moderator :  Sekretaris/ Wakil Sekretaris I/ Wakil Sekretaris II Tim Kerja FOLU <i>Net Sink 2030</i>
15.30 – 16.00	<i>Coffee Break</i>	UPT Penanggung Jawab
16.00 – 16.30	<i>Wrap Up</i> dan Penutupan	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

## G. Anggaran

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Sub Nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Region Papua di 4 (empat) provinsi memerlukan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Kerjasama Indonesia – Norwegia *Result Based Contribution* Tahap Kesatu Tahap Kesatu atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Juli 2024  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi  
 Kehutanan dan Tata Lingkungan,**



**Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc.  
 NIP. 19730523 199803 1 002**